

# EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

Anjar Saepul<sup>1</sup>, Neti Sunarti<sup>2</sup>, Kiki Endah<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail : Anjarsaepul98 @gmail.com

## ABSTRAK

*Hasil observasi diketahui bahwa efektivitas Program Padat Karya pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum dijalankan dengan baik, hal ini terlihat dari ketepatan waktu pengerjaan program padat karya yang tidak tepat. Hal ini terlihat dari hasil pengerjaan selokan yang hanya menghasilkan 150 m yang seharusnya 300 m dalam waktu 1 minggu dengan jumlah pekerja 7 orang yang disebabkan oleh kurangnya keahlian masyarakat yang mengikuti program padat karya dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, ketepatan dalam menentukan pilihan yang kurang tepat. Hal ini terlihat dari keluhan masyarakat usia 20 tahun ke atas yang masih menganggur, anak-anak remaja yang masih sekolah yang terpilih menjadi pekerja program padat karya, kurangnya pemahaman dari Pemerintah Desa dan LPM dalam pendataan calon kriteria penerima manfaat Program padat karya tunai sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program padat karya di masa pandemi covid-19 Desa Kertamukti kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Program Padat Karya pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Makmur (2011:7) tentang unsur-unsur efektivitas, dan hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan pandangan dan masih adanya tarik ulur berbagai kepentingan di antara elemen di desa, masih ada pelaksana di lapangan yang kurang memahami perhitungan biaya untuk pelaksanaan padat karya, kurangnya pemahaman dari Kadus dan Rt/Rw terhadap kriteria penerima program padat karya, perlu adanya pertimbangan yang matang karena itu dalam pendataannya perlu dilakukan secara keseluruhan, kurang melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan, Pemerintah desa kurang melakukan pendataan secara langsung ke lapangan, kurangnya keterbukaan dari*

*pemerintah desa dalam melakukan penentuan terhadap masyarakat penerima manfaat program padat karya di desa*

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Program Padat Karya*

## **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Oleh karena itu maka pemerintah membuat kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dikeluarkan pada 21 April 2020, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang mana tertuang pada bagian poin kedua yang disebutkan bahwa : “Memfasilitasi pemerintah desa agar segera melakukan perubahan dan/atau membelanjakan APBDesa untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan Covid-19”. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dianggarkan termasuk pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa melalui jenis belanja tak terduga, dalam bentuk pelaksanaan padat karya tunai, kegiatan penguatan ekonomi desa, dan pemberian bantuan langsung tunai.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diamanahkan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya yang telah ditetapkan lebih awal, yakni pada 24 Maret 2020 yang selanjutnya telah diubah menjadi SE Nomor 11 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya dimana telah ditetapkan pada 30 Maret 2020, yang pada maksudnya Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya tersebut ialah sebagai acuan dalam pelaksanaan desa tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai dengan menggunakan dana desa.

Didalam ketentuan, baik Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, maupun Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya sebagaimana telah diubah menjadi SE Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya, keduanya membahas hal yang sama yakni karena sebab adanya pandemi Covid-19 megakibatkan terjadinya kemunduran atas kualitas sumber daya manusia maka perlu dilakukan penguatan dalam sendi-sendi ekonomi melalui padat karya tunai desa dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan

penanganan Covid19 yang selanjutnya perlu dilakukan padat karya tunai desa dimana dana desa digunakan dengan pola padat karya, melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa serta kegiatan penguatan ekonomi desa, dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Program padat karya merupakan kegiatan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya untuk masyarakat miskin dan marginal, dan bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dalam kondisi terjadinya pandemi Covid-19 yang merupakan *force majeure*, kegiatan PKTD perlu disesuaikan agar sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan wabah itu di desa.

Menurut Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2020:2) secara konseptual, kegiatan PKTD memiliki enam tujuan utama yaitu :

Pertama, menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai. Kedua, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat desa. Ketiga, meningkatkan

kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa. Keempat, meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Kelima, menekan jumlah penganggur, dan masyarakat miskin. Dan keenam, membangkitkan sosial dan ekonomi di desa. Selanjutnya, diperlukan upaya harmonisasi tujuan tersebut dengan kondisi dan kebijakan saat ini dalam mencegah dan menangani Covid-19 di perdesaan.

Program Padat Karya didanai dari dana desa sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sebagai dampak adanya wabah Covid 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara

langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Kertamukti merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran termasuk desa yang menerapkan program padat karya untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga melalui program tersebut masyarakat dapat terbantu tingkat perekonomiannya. Namun demikian dalam pelaksanaannya program tersebut belum terlaksana secara optimal.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Efektivitas dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program tersebut.

Menurut Beni (2016:69) menyatakan bahwa efektivitas adalah :

Hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Steers yang dikutip oleh Sutrisno (2010:89), menyatakan bahwa : "Pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia".

Sedangkan menurut Edi (2007:13) menjelaskan bahwa : "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya".

Berdasarkan para pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan Efektivitas juga merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif apabila semua rencana kegiatan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai, "segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh." Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas

dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kelima kriteria tersebut, yaitu: upaya/usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, efisien biaya dari pelaksanaan program, hasil dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya, efektivitas biaya program yaitu besaran biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program.

Menurut ketentuan Pasal 1 poin 15 Permendes 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dinyatakan bahwa :

Program Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan utama pembuatan kebijakan ini adalah memberdayakan masyarakat yang menganggur sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya.

Kebijakan Padat Karya sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak bisa bekerja di perdesaan maupun perkotaan dikarenakan tidak mampu untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka mempunyai kemungkinan menganggur.

## **METODE**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Silalahi (2012:9) menyatakan bahwa yang dikatakan penelitian ilmiah adalah sebagai berikut :

Penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang diduga terdapat fenomena-fenomena itu. Penelitian ilmiah merupakan cara yang tepat untuk menemukan solusi suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Brog and Gall (Sugiyono, 2014:7) tentang penelitian kualitatif mengemukakan bahwa : “Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme”. Metode ini disebut juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih

bersipat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas program padat karya di masa pandemi covid-19 Desa Kertamukti kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran**

#### **a. Ketepatan Penentuan Waktu**

##### **1) Adanya perencanaan penetapan waktu dalam pelaksanaan program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan program padat karya perlu adanya perencanaan yang matang dengan menyamakan persepsi dan menyamakan kepentingan tentang pelaksanaan program pada karya di desa agar dapat melakukan penyusunan perencanaan waktu pelaksanaan program padat karya di desa secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di desa dan hal ini akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

##### **2) Adanya penggunaan waktu yang sesuai dengan perencanaan pelaksanaan program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan program padat karya perlu adanya pemahaman dari tim pelaksana di lapangan terhadap tingkat kesulitan dari pengerjaan kirmir dalam program

padat karya sehingga dapat menentukan penggunaan waktu yang tepat dan tidak dipaksakan, dan perlu adanya perencanaan yang matang dengan menyamakan persepsi dan menyamakan kepentingan agar dapat melakukan penyusunan perencanaan penggunaan waktu pelaksanaan program padat karya di desa dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di desa.

#### **b. Ketepatan Perhitungan Biaya**

##### **1) Adanya perencanaan anggaran dalam perhitungan biaya untuk pelaksanaan program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan kirmir selokan dalam program padat karya di desa perlu adanya perencanaan perhitungan biaya yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dan dapat menimalisir penyelewengan terhadap anggaran pelaksanaan program padat karya di desa.

##### **2) Adanya kesesuaian biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan pelebaran selokan di desa perlu adanya rancangan anggaran biaya pengerjaan agar dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

### **c. Ketepatan Dalam Pengukuran**

#### **1) Adanya kriteria penerima program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam dengan adanya kriteria terhadap calon penerima manfaat program padat karya di desa perlu adanya pemahaman yang sama di antara perangkat desa dan semua elemen yang berkepentingan sehingga dalam penentuannya dapat di sesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

#### **2) Adanya kriteria sasaran penerima manfaat program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam dalam penentuan masyarakat sasaran penerima manfaat program padat karya di desa perlu adanya kepekaan dari pemerintah desa dengan melakukan pendataan secara langsung ke tengah-tengah masyarakat agar dapat mengetahui secara jelas kondisi masyarakat sasaran penerima manfaat program padat karya di desa sehingga dalam penentuannya dapat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan hal ini akan menghindari kecemburuan sosial diantara masyarakat dalam penentuan masyarakat penerima manfaat program padat karya di desa.

### **d. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan**

#### **1) Adanya pertimbangan dalam pendataan penyeleksian kriteria sasaran penerima manfaat program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam melaksanakan

penyeleksian terhadap sasaran penerima manfaat program padat karya di desa perlu di dasari dengan adanya pendataan yang jelas dan terperinci sehingga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### **2) Adanya pertimbangan dalam pemilihan penerima manfaat program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam dalam melakukan proses penyeleksian terhadap masyarakat penerima manfaat program padat karya di desa sudah didasari dengan adanya pendataan secara langsung ke masyarakat sehingga dapat mengetahui secara jelas kondisi yang sebenarnya dari masyarakat penerima manfaat program padat karya di desa untuk selanjutnya dilakukan penentuan terhadap masyarakat penerima manfaat program padat karya di desa dan hal ini perlu adanya keterbukaan dari pemerintah desa sehingga dalam proses penentuannya dapat di ketahui oleh semua elemen masyarakat di desa dan hal ini akan menjaga kecurigaan dan dapat meminimalisir kecemburuan di antara masyarakat di desa.

### **e. Ketepatan Berpikir**

#### **1) Adanya kemampuan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlu adanya perhatian secara serius dari pemerintah desa sebagai penanggung jawab program padat karya di desa sehingga dapat dilakukan

pengawasan secara langsung, hal ini akan mempermudah terhadap pemerintah desa untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan dapat memberikan solusi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan padat karya.

**2) Adanya kepedulian dan kegotongroyongan dari masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan program padat karya di desa perlu adanya kesadaran dan keinginan dari semua elemen masyarakat di desa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengerjaan pembangunan program padat karya di desa, dan hal ini perlu adanya keaktifan dari pemerintah desa untuk berinkansi dan merangkul semua elemen masyarakat di desa tentang pentingnya gotong royong dalam pengerjaan pembangunan program padat karya di desa karena hal ini merupakan kepentingan bersama.

**f. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah**

**1) Adanya kejelasan perintah dalam pelaksanaan program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya komunikasi yang baik diantara pemerintah desa dan pelaksana di lapangan akan mempermudah untuk memahami perintah dalam pelaksanaan program padat karya di desa.

**2) Adanya konsistensi perintah dalam pelaksanaan program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan program padat karya di desa adanya peningkatan terhadap pemahaman dari pemerintah desa sehingga dapat konsisten dalam memberikan perintah tentang pengerjaan pembangunan program padat karya di desa.

**g. Ketepatan Dalam Mentukan Tujuan**

**1) Terwujudnya tujuan dari program padat karya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlu adanya kepekaan dan perhatian secara serius dari pemerintah desa untuk mengoptimalkan anggaran dalam pelaksanaan pengerjaan program padat karya di desa sehingga tujuan dari program padat karya di desa dapat mudah dicapai.

**2) Adanya pelaksanaan program padat karya sesuai pedoman yang telah ditetapkan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan program padat karya di desa perlu adanya pedoman yang jelas sebagai acuan dalam penyelenggaraan program padat karya di desa sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan dilapangan dan dapat mempermudah untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan program padat karya di desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu di desa.

#### **h. Ketepatan Sasaran**

##### **1) Adanya ketercapaian realisasi program padat karya kepada masyarakat berpenghasilan rendah**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk merealisasikan ketercapaian dari pelaksanaan program padat karya di desa perlu adanya perhatian dan kerjasama diantara pemerintah desa dan pelaksana di lapangan serta semua elemen masyarakat di desa karena hal ini menyangkut dengan kepuasan dan keterlibatan masyarakat dalam program padat karya yang dilaksanakan di desa.

##### **2) Adanya ketercapaian program padat karya dalam jangka pendek**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk melihat ketercapaian dan realisasi dari program padat karya di desa dapat dilihat dari banyaknya keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam program padat karya di desa akibat dari dampak pandemi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa walaupun memang hanya dalam jangka pendek tetapi dengan adanya program padat karya di desa dapat membantu terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program padat karya di masa pandemi covid-19 Desa Kertamukti kecamatan Cimerak

kabupaten Pangandaran maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Efektivitas program padat karya di masa pandemi covid-19 Desa Kertamukti kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran, berdasarkan hasil wawancara diketahui belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Makmur (2011:7) hal ini dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih adanya perbedaan pandangan dan masih adanya tarik ulur berbagai kepentingan berbagai elemen di desa sehingga menghambat dalam penentuan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu pemerintah desa dan BPD serta pelaksana di lapangan telah mengupayakan dengan melakukan musyawarah untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan program padat karya agar dapat melakukan penyusunan perencanaan penetapan waktu secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di desa.
2. Masih adanya tim pelaksana di lapangan dan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah desa sehingga masih adanya anggapan adanya ketidakterbukaan dalam penentuan anggaran untuk program padat karya. oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan yaitu dengan membagikan hasil perhitungan biaya untuk pelaksanaan pengerjaan program

- padat karya di desa terhadap tim pelaksana lapangan dan masyarakat pekerja program padat karya di desa.
3. Masih adanya hambatan dalam menentukan kriteria penerima program padat karya di desa yang terkadang terlalu dipaksakan walaupun kurang sesuai dengan kriteria penerima program yang ada, hal ini dikarenakan adanya kedekatan dengan sebagian masyarakat di desa. Oleh karena itu BPD telah berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah desa untuk melakukan pembahasan agar dapat diketahui secara jelas dan terperinci terkait dengan kriteria bagi masyarakat kriteria penerima program padat karya di desa
  4. Masih adanya ketidakpuasan dari sebagian masyarakat penerima manfaat program padat karya di desa, oleh karena itu pemerintah desa berupaya merangkul semua elemen masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang proses dalam penentuan terhadap masyarakat penerima manfaat program padat karya di desa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
  5. Masih kurangnya koordinasi dari pelaksana di lapangan terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan, oleh karena itu pemerintah desa berupaya membangun komunikasi dengan pelaksana di lapangan agar dapat melakukan koordinasi secara rutin sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan hal ini akan mempermudah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan
  6. Kurangnya penjelasan secara terperinci terkait dengan perintah dalam pelaksanaan pengerjaan program padat karya di desa sehingga mempersulit terhadap pelaksanaan pengerjaan di lapangan, oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah desa agar dalam memberikan perintah untuk pengerjaan pembangunan program padat karya perlu dibarengi dengan penjelasan secara terperinci agar dapat mempermudah terhadap pekerja di lapangan untuk mengaplikasikannya dalam pekerjaan
  7. Masih kurangnya dilakukan pembahasan terkait dengan perintah dalam pelaksanaan program padat karya di desa, oleh karena itu sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan melakukan pembahasan bersama semua aparatur pemerintah desa sehingga dapat memahami secara jelas dan terperinci dan hal ini akan dapat mempermudah untuk memberikan perintah terhadap pelaksana di lapangan dan hal ini tidak membingungkan terhadap para pelaksana di lapangan

8. Kurangnya perencanaan yang matang di tingkat pelaksana di lapangan, oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan menekankan terhadap tim pelaksana di lapangan untuk melakukan perencanaan secara matang agar dapat mengakomodir semua kepentingan dan keinginan dari masyarakat desa secara keseluruhan

Pertama. Cetakan. Pertama.  
Jakarta : Penerbit Kencana

Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Cetakan Ke-8. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Beni Pekei. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia

Edy Sutrisno. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Dana Desa

Permendes 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021